

BAB III

DESKRIPSI WILAYAH

Dalam penelitian ini mengenai pilkada serentak kota Malang tahun 2018 yang lebih fokusnya kepada lembaga pengawas pemilu atau yang biasa disebut dengan Badan Pengawas Pemilu. Dengan judul efektivitas fungsi bawaslu kota Malang dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2018. Oleh sebab itu pada bab ini selanjutnya membahas terkait dengan deskripsi keadaan wilayah Kota Malang serta mendeskripsikan tentang lembaga terkait dengan pilkada serentak yaitu Badan Pengawas Pemilu kota Malang. Yang pertama akan membahas yang berkaitan dengan gambaran dalam konteks umum kota Malang, berkaitan sejarah, pemerintahan, serta kondisi geografis, administrasi, serta yang kedua akan membahas profil dari Bawaslu kota Malang sebagai lembaga terkait pilkada serentak tahun 2018.

3.1 Gambaran Umum Kota Malang

3.1.1 Sejarah

Dilihat dari sudut pandang latar belakangnya, kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia. Yang pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasum atau fasilitas umum direncanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih membekas cukup dalam hingga sekarang. Misalnya, Ijen Boulevard kawasan sekitarnya. hanya dinikmati oleh keluarga-keluarga Belanda dan bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas dan menerima bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali

mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim di sana untuk mengenang masa lalu.⁷⁰

Hingga pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesat. Berbagai macam kebutuhan masyarakat semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai aktivitas. Hal itu mengakibatkan terjadi merubahnya tata guna lahan atau tanah, wilayah yang tiba-tiba terdapat bangunan yang bermunculan tanpa kontrol. Perubahan tata guna tanah memberikan efek perubahan yang sangat pesat, seperti bagian dari fungsi lahan pertanian menjadi lahan perumahan ataupun lahan industri.

Seiring berkembangnya waktu serta perkembangan yang telah disebutkan sebelumnya diatas, urbanisasi secara terus menerus berlangsung dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal ataupun perumahan meningkat di luar batas kemampuan pemerintah, disisi lainnya tingkat ekonomi urbanis sangat minim sekali, dimana hal itu akan berakibat memicu tumbuhnya perumahan-perumahan liar yang pada saat itu umumnya berkembang di wilayah-wilayah perdagangan, di jalanan sepanjang jalur hijau, sekitaran sungai, tidak jauh dari rel kereta api dan tanah atau lahan yang dianggap tidak bertuan. Dalam kurun waktu yang cukup lama kemudian daerah tersebut menjadi perkampungan yang dikatakan tidak memenuhi syarat perkampungan, serta disisi lainnya juga degradasi kualitas lingkungan hidup mulai bermunculan dengan segala dampak yang ikut terbawa arus. Gejala yang dialami itu cenderung terus meningkat, dan

⁷⁰ <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/sejarah-malang/>. diakses melalui google pada 4 Agustus 2019

paasti sulit dibayangkan apa yang akan terjadi apabila permasalahan tersebut dihiraukan.⁷¹

Nama kota Malang sendiri hingga saat ini masih dikaji oleh para ahli sejarah berasal dari mana nama “Malang”. Berbagai macam sumber terus menerus digali agar mendapatkan jawaban atau pengetahuan yang paling tepat mengenai latar belakang ataupun asal-usul adanya nama kota “*Malang*”.

Malang Berasal dari Nama Bangunan Suci. Terdapat banyak penelitian tentunya akan menghasilkan suatu atau beberapa hipotesa, diantaranya merupakan nama “*Malang*” yang dimana nama tersebut berasal dari *Malangkucecwara*. Kalimat itu memang sering atau dapat kita jumpai didalam lambang Kota Malang baik di internet ataupun di sudut-sudut atau baliho-baliho yang ada di Kota Malang. Menurut dari beberapa para ahli yang bersumber dari internet, *Malangkucecwara* merupakan nama dari suatu bangunan suci. Hipotesa ini terbentuk karena nama bangunan suci itu sendiri telah ditemukan didalam prasasti yang dimiliki Raja Balitung (berasal dari Jawa Tengah) yaitu prasasti Mantyasih yang tertulis di tahun 907 dan 908.⁷²

Malang Diambil dari Nama Puncak Gunung. Didalam hipotesa yang lainnya menyatakan bahwasannya istilah atau nama “*Malang*” diambil dari sebuah gunung yang terletak di barat Kota Malang yang dimana gunung tersebut bernama gunung Malang. Selain itu di salah satu puncak gunung di Pegunungan yang membentang yang terletak di wilayah sebelah timur Kota Malang juga memiliki nama Malang.⁷³

⁷¹ Ibid

⁷² <https://satujam.com/sejarah-kota-malang/>. diakses melalui google pada 4 agustus 2019.

⁷³ Ibid

Malang Berasal dari Sebuah Nama Desa. Selain hal diatas, di wilayah utara Kota Malang yaitu tepatnya di Tumpang terdapat sebuah desa yang sejak dahulu kala memiliki nama “*Malangsuka*” yang dapat diduga oleh masyarakat setempat serta para ahli berasal dari kata *Malankuca*. Di daerah desa atau wilayah tersebut juga banyak ditemukan peninggalan sejarah yang meliputi Candi Kidal dan Candi Jago.⁷⁴

Malang Diambil dari Bahasa Jawa. Hipotesa atau pemahaman yang selanjutnya mengenai asal-usul kota malang yaitu memberikan penjelasan bahwa nama “*Malang*” berasal dari kata dalam Bahasa Jawa Malang yang memiliki arti “*Menghalang-halangi*” atau “*Membantah*”. Di dalam sejarah dahulu kala, diceritakan bahwa ada seorang sunan yang bernama sunan Mataram dimana beliau mempunyai keinginan untuk memperbanyak atau memperluas pengaruhnya ke daerah atau wilayah-wilayah yang ada di seluruh plosok Jawa Timur. Akan tetapi disaat berada di daerah Malang, penduduk asli mengumandangkan perang besar untuk menghalangi keinginan Sunan Mataram, tidak tahu apa yang melatarbelakangi penduduk asli mengapa meghalangi Sunan mataram untuk menyebarkan ilmunya dan sejak saat itu juga beliau menyebut wilayah tersebut sebagai *Malang*.⁷⁵

⁷⁴ Ibid

⁷⁵ Ibid

3.1.2 Arti lambang kota Malang



Gambar 3.1 Lambang Kota Malang

Sumber : Malangkota.go.id

Kota Malang memiliki lambang berbentuk persegi lima yang terdiri dari satu buah segi lima berwarna hijau, garis tepi yang mengikuti bentuk segi lima berwarna merah putih, satu buah garis berbentuk bintang berwarna kuning, satu buah tugu berwarna biru serta tulisan yang dijadikan motto kota malang yaitu **“MALANG KUCECWARA”** berarti *Tuhan menghancurkan yang bathil, menegakkan yang benar.*

Tabel 3.1 Warna dalam lambang

Merah Putih	adalah lambang bendera nasional Indonesia
Kuning	berarti keluhuran dan kebesaran
Hijau	adalah kesuburan
Biru Muda	berarti Kesetiaan pada Tuhan, Negara dan Bangsa

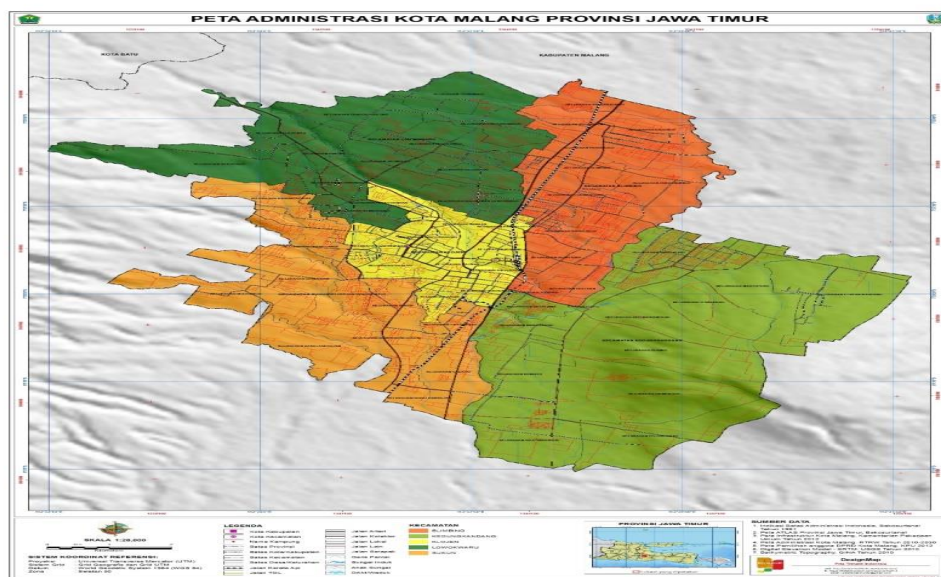
Sumber : malangkota.go.id

DPRDGR mengukuhkan lambang Kotamadya Malang dengan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 1970. Bunyi semboyan pada lambang **“MALANG KUCECWARA”** Semboyan tersebut dipakai sejak hari peringatan 50 tahun berdirinya KOTAPRAJA MALANG 1964, sebelum itu yang digunakan adalah **“MALANG NAMAKU, MAJU TUJUANKU”** yaitu terjemahan dari : **“MALANG NOMINATOR, SURSUMMOVEOR”** Yang disahkan dengan **“Gouvernement besluit dd. 25 April 1938 N. 027”**. Semboyan baru itu diusulkan

oleh Almarhum Prod.DR. R.Ng.Poernatjaraka, dan erat hubungannya dengan asal mula Kota Malang pada jaman Ken Arok⁷⁶.

Kota Malang memang pantas diberi beberapa julukan yang tertera diatas, Kota Malang sekarang bisa saja disebut dengan kota metropolitan yang besar akan pendidikan. Dengan pendidikan yang berkualitas yang terdapat dikota Malang, daerah ini menyandang gelar salah satu kota pendidikan terbesar di Indonesia. Tak kalah dengan Surabaya, disini juga terdapat berbagai universitas ternama dan terakreditasi. Oleh karena factor banyaknya pendidikan di Kota Malang disebut dengan kota metropolitan yang macet dan banyak perantau yang menetap disini.

3.1.3 Kondisi Geografis



Gambar 3.2 Peta Kota Malang

Sumber : *Wikipedia.org*

KEADAAN GEOGRAFI

Wilayah Kota Malang merupakan daerah yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut (mdpl), daerah ini merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur yang menarik dikarenakan terdapat potensi

⁷⁶<https://malangkota.go.id/sekilas-malang/makna-lambang/>. Diakses melalui google pada 4 Agustus 2019

alam dan iklim yang dimiliki cukup sejuk untuk dinikmati. Letaknya bagaikan dilindungi oleh wilayah kabupaten Malang karena posisinya berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang jika dilihat secara astronomis terletak pada $112,06^{\circ} - 112,07^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ} - 8,02^{\circ}$ Lintang Selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. *Sebelah Utara* : Di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Singosari dan Kec. Karangploso Kabupaten Malang
2. *Sebelah Timur* : Di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang
3. *Sebelah Selatan* : Di sebelah selatan Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang
4. *Sebelah Barat* : Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Serta dikelilingi gunung-gunung :

1. *Gunung Arjuno di sebelah Utara*
2. *Gunung Semeru di sebelah Timur*
3. *Gunung Kawi dan Panderman di sebelah Barat*
4. *Gunung Kelud di sebelah Selatan*

IKLIM

Selama tahun 2008 tercatat rata-rata suhu udara di Kota Malang berkisar antara $22,7^{\circ}\text{C} - 25,1^{\circ}\text{C}$. Sedangkan suhu maksimum mencapai titik $32,7^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum mencapai $18,4^{\circ}\text{C}$. Kelembaban udaranya berkisar rata-rata 79% sampai dengan 86%. Dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum mencapai 40%. Seperti pada umumnya pada daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso Curah hujan yang tinggi kerap terjadi pada bulan Pebruari, November, dan Desember. Sedangkan pada

bulan Juni dan September Curah hujan rendah. Kecepatan maksimum terjadi di bulan Mei, September, dan Juli.⁷⁷

KEADAAN GEOLOGI

Keadaan tanah di wilayah Kota Malang antara lain :

1. *Bagian selatan*, di bagian wilayah ini termasuk dataran tinggi yang cukup luas, dan cocok untuk perkebunan
2. *Bagian utara*, di bagian wilayah ini termasuk dataran tinggi yang subur, dan cocok untuk pertanian
3. *Bagian timur*, di bagian ini merupakan dataran tinggi dengan keadaan kurang kurang subur
4. *Bagian barat*, di bagian ini merupakan dataran tinggi yang sangat luas dan sekarang menjadi daerah pendidikan⁷⁸

JENIS TANAH

Jenis tanah di wilayah Kota Malang ada 4 macam, antara lain :

1. *Alluvial kelabu kehitaman* yang memiliki luas 6,930,267 Ha.
2. *Mediterranean coklat* yang memiliki luas 1.225.160 Ha.
3. *Asosiasi latosol coklat kemerahan grey coklat* yang memiliki luas 1.942.160 Ha.
4. *Asosiasi andosol coklat dan grey humus* yang memiliki luas 1.765,160 Ha

Struktur tanah di Kota Malang memang pada umumnya baik, akan tetapi yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah penggunaan jenis tanah andosol yang memiliki sifat peka terhadap erosi. Jenis tanah andosol ini terdapat di Kecamatan lowokwaru dengan kemiringan sekitar 15 %.⁷⁹

⁷⁷ Malangkota.go.id diakses pada 4 Agustus melalui google

⁷⁸ Ibid

⁷⁹ Ibid

3.1.4 Kondisi Demografi

Masyarakat atau penduduk merupakan sebagai subyek sekaligus obyek dari pembangunan, oleh sebab itu suatu keberhasilan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari permasalahan kependudukan, artinya keduanya memang saling berhubungan. Untuk itu, dalam mendukung tercapainya hasil-hasil pembangunan yang optimal, data kependudukan merupakan hal yang paten dan sangat diperlukan.

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Jumlah penduduk atau masyarakat di Kota Malang dilihat dari gender laki-laki dan perempuan pada setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2019. Dengan rata - rata jumlah penduduk kecamatan mengalami kenaikan dari 2011 – 2019 kecuali 1 (satu) daerah yaitu kecamatan Klojen, baik dilihat dari laki-laki dan perempuannya menurun setiap tahunnya. Sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Lowokwaru.⁸⁰

Menurut BPS dalam Kota Malang dalam angka memperoleh catatan hingga akhir tahun 2019 sebesar 197.859 jiwa dengan luas wilayah 2,089.513 Ha , sedangkan di tahun 2011 sebanyak 187.948 jiwa dan pada tahun 2015 sebesar 193.231 jiwa, dan laju pertumbuhan di tahun 2011-2015 2,86 persen di tahun 2015 – 2019 2,34 persen.⁸¹

⁸⁰ <https://malangkota.bps.go.id/dynamictable/2019/05/15/19/jumlah-penduduk-di-kota-malang-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-2011-2020.html>. Diakses melalui google pada 4 Agustus 2019

⁸¹ Ibid

Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Malang

Kecamatan	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Jiwa)								
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kedungkandang	177.260	179.512	181.834	183.927	186.068	188.175	190.274	192.316	194.341
Sukun	183.690	185.352	187.074	188.545	190.053	191.513	192.951	194.321	195.659
Klojen	105.755	105.399	105.060	104.590	104.127	103.637	103.129	102.584	102.018
Blimbing	173.838	174.891	175.988	176.845	177.729	178.564	179.368	180.104	180.805
Lowokwaru	187.948	189.373	190.847	192.066	193.321	194.521	195.692	196.793	197.859
KOTA MALANG	828.491	834.527	840.803	845.973	851.298	856.410	861.414	866.118	870.682

Sumber : BPS kota Malang 2019 (malangkota.bps.go.id)

3.1.5 Pemerintahan Kota Malang

Kota Malang merupakan salah satu dari 9 kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kota Malang adalah kota metropolitan kedua setelah Surabaya. Kota Malang juga merupakan kota pendidikan yang ditandai banyaknya sekolah dan universitas ternama di Provinsi Jawa Timur. Ibukota dari Kota Malang bertempat di Kecamatan Klojen, di tandai dengan sebagian bangunan gedung perkantoran pemerintahan sudah dibangun di Kecamatan Klojen.

Kota Malang memiliki kepala daerah yaitu walikota Drs. H. Sutaji dan wakilnya Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko periode 2018 – 2023. Walikota dibantu oleh 7.854 Pegawai Negeri Sipil. Jenjang pendidikan sebagian besar PNS adalah Sarjana (S1), tetapi ada sebagian yang berpendidikan SMA ke bawah. Jumlah OPD Dinas di kota Malang 2017 berjumlah 29 yang terdiri dari 8 Badan, 16 Dinas, dan 5 Kecamatan. Dalam skala Pemerintahan yang lebih kecil terdapat 57 kelurahan yang dikelola oleh 721 perangkat kelurahan termasuk kepala kelurahan.

Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) merupakan satuan wilayah di bawah kelurahan. Menurut data yang didapat terakhir pada tahun 2015 terdapat 544 RW dan 4.111 RT.⁸²

Pemerintah daerah merupakan suatu organisasi daerah yang memiliki peran penting dalam melakukan pembangunan daerah serta memberikan dampak yang baik kepada masyarakatnya dari segi apa saja termasuk kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kota Malang memiliki otoritas dalam mengelola pembangunan yang baik. Pembangunan dilakukan bertujuan untuk memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat secara langsung.⁸³ Kota Malang memiliki walikota yang terpilih di periode 2018-2023 yakni Drs. H. Sutaji dan wakilnya Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko yang memiliki Visi dan Misi sebagai berikut;

VISI

“KOTA MALANG BERMARTABAT”

Hakikat Bermartabat

Perwujudan serta Implementasi dari suatu kewajiban dan tanggung Jawab manusia sebagai *khalifah*, kepada masyarakat yang dipimpin. Bermartabat sendiri merujuk pada suatu nilai harga diri dari kemanusiaan, dimana hal itu memiliki arti sebagai kemuliaan.

Baldatun Thoyibatun Wa Robbun Ghofur:

Terciptanya *Situasi, Kondisi atau keadaan*, serta *tatanan* dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dengan seluruh atau segenap Masyarakat⁸⁴

MISI

- a. Meningkatkan akses serta kualitas di bidang pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya bagi seluruh warga.
- b. Mewujudkan kota yang produktif serta berdaya saing yang berbasis *ekonomi kreatif, keberlanjutan* dan *keterpaduan*.
- c. Mewujudkan kota yang rukun serta memiliki toleran berasaskan keberagaman dan memiliki keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender.

⁸² <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/visi-dan-misi/>. Diakses melalui google pada 4 Agustus 2019

⁸³ Ibid

⁸⁴ Ibid

- d. Memastikan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah dimana tertib akan hukum serta akuntabel.⁸⁵

Kota Malang merupakan Kota yang kompleks, baik dilihat dari segi pendidikan maupun perekonomiannya. Begitu juga mengenai Visi dan Misi Kota Malang tersebut. Visi dan Misi yang ditetapkan untuk daerah ini bertujuan untuk membangun kota yang ideal dan berkualitas dan mampu bersaing dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Akan tetapi Visi dan Misi Kota Malang tidak berkaitan dengan jalannya demokrasi di Indonesia ataupun di daerah ini. Ada lembaga lain yang menangani jalannya hal tersebut. Yaitu Badan Pengawas Pemilu Kota Malang, karena pemilu juga merupakan kegiatan demokrasi maka badan ini dipercaya untuk mengemban amanah sebagai pendukung jalannya demokrasi.

Visi Kota Malang lebih tertuju kepada aspek sosial yang berkembang di daerah serta menjunjung tinggi asas kemanusiaan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan bermartabat. Sedangkan Visi Bawaslu Kota Malang lebih tertuju kepada aspek yang lebih kecil yaitu lembaga itu sendiri, yang bertujuan untuk menjadi lembaga yang berkualitas dan dipercaya oleh masyarakat.

Misi Kota Malang untuk membentuk daerah yang berkualitas lebih tertuju kepada aspek sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, serta pemerintahan. Bagaimanapun bentuk misi yang ditetapkan tetaplah bertujuan agar menjadi daerah yang maju dan selalu berkembang serta berdaya saing. Sedangkan Misi dari Bawaslu Kota Malang lebih tertuju kepada jalannya demokrasi di daerah ini. Dalam membentuk Misi dari lembaga ini juga bertujuan untuk menjadi lembaga yang berdaya saing dengan kualitas lembaga yang baik dan terpercaya serta selalu

⁸⁵ Ibid

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya agar lembaga ini dipercaya oleh masyarakat demi terciptanya kondisi aman dan nyaman di Kota Malang mengenai jalannya demokrasi yang setiap tahun pemilu selalu berbeda.

3.2. Badan Pengawas Pemilu Kota Malang

Dasar pembentukan Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat bawaslu terdapat pada Undang-Undang no 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu. Dalam bab IV undang-undang tersebut menjelaskan bahwa bawaslu adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam melaksanakan tugasnya, bawaslu didukung oleh sekretaris jendral Badan Pengawas Pemilu. Selain itu keanggotaan bawaslu merupakan kalangan yang memiliki profesionalitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas pengawasan dan tidak menjadi bagian dari partai politik.

Gambaran singkat mengenai sejarah Badan Pengawas Pemilu terjadi pada 39 tahun silam. Dalam sejarahnya pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada waktu pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu maupun adanya badan atau lembaga yang menangani pengawasan terkait pemilu. Pada era itu terbangun trust di seluruh peserta dan warga tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Meskipun pertentangan pada saat itu cukup kuat, tapi dapat dikatakan sangat minim terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan tahapan, walaupun ada gesekan terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul

merupakan konsekuensi logis pertarungan antar 85eriodic pada saat itu. Hingga kini masih menuai keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Badan pengawas pemilu di Indonesia menurut undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terbagi menjadi berapa bagian. Yakni Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota, Panwaslu Kecamatan, serta Panwaslu Desa/Kelurahan.

Dalam sub bab ini lebih atau fokus untuk membahas gambaran mengenai Bawaslu kota Malang. Bawaslu kota Malang merupakan lembaga yang melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu di wilayah kota Malang. Artinya badan atau lembaga ini hanya atau mencakup pada seluruh wilayah kota Malang saja. Sesuai dengan dasar hukum yang disebutkan, Bawaslu kota Malang hanya berwenang, bertugas, serta memiliki kewajiban kepada daerahnya.

Bawaslu kota Malang telah ditetapkan menjadi badan atau lembaga yang permanen setelah pelaksanaan pilkada kota Malang 2018. Sebelumnya Bawaslu kota Malang merupakan lembaga adhoc, dimana lembaga tersebut dibentuk ketika ada pelaksanaan pemilu saja dan jika tidak ada pelaksanaan atau kegiatan pemilu maka lembaga tersebut dibubarkan untuk sementara.

Lembaga adhoc secara umum merupakan sesuatu yang dibentuk atau dimaksudkan untuk tujuan atau kebutuhan tertentu saja, tidak direncanakan sebelum itu terjadi. Istilah Ad Hoc berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti “untuk ini” atau “untuk tujuan khusus ini”. Kata “Ad Hoc” sering digunakan

dalam bidang hukum, organisasi, teknologi, maupun sosial. Jadi, definisi Ad Hoc bisa berbeda-beda, tergantung apa konteks yang sedang dibicarakan.⁸⁶

Beberapa ahli mendefinisikan adhoc antara lain menurut Mahfud MD ad hoc “itu artinya sejak semula, dimaksudkan sementara sampai terjadi situasi normal.” Sedangkan menurut Jimly Jimly Asshiddiqie ad hoc adalah “lembaga-lembaga yang sifatnya sementara atau tidak permanen.”⁸⁷

Seperti yang dikatakan diatas, adhoc tergantung kepada konteks yang sedang dijalankan atau dilaksanakan. Maka dalam konteks pemilu terkait dengan Badan Pengawas Pemilu, adhoc merupakan lembaga atau kepanitiaan sementara atau yang biasa disebut panitia pengawas pemilu atau panwaslu dalam istilah pemilu.

Jadi sebelumnya atau sebelum pilkada kota Malang tahun 2018, Badan Pengawas Pemilu kota Malang bernama Panitia Pengawas Pemilu Kota Malang. Hampir diseluruh kota/kabupaten di Indonesia baru diresmikan Badan permanen yang bernama Bawaslu di daerah setelah terselenggaranya pilkada serentak tahun 2018 di Negara Indonesia.

Untuk mengetahui lebih lengkapnya secara terperinci dari awal mula pengawasan dalam pemilu dikenal hingga terbentuknya Bawaslu Pusat hingga Kabupaten/Kota, penulis akan menjabarkan sejarah Bawaslu melalui tulisan serta tabel dibawah ini agar dapat menambah wawasan mengenai proses terbentuknya Bawaslu yaitu akan dijelaskan Sebagai berikut;

⁸⁶ <https://www.maxmanroe.com/vid/organisasi/pengertian-ad-hoc.html>. Diakses melalui google pada 5 Agustus 2019

⁸⁷ Ibid

3.2.1. Sejarah Badan Pengawas Pemilu

Bawaslu merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang memiliki tugas mengawasi jalannya pemilu di seluruh wilayah Negara Indonesia. Sampai saat ini Bawaslu dengan KPU merupakan organisasi bersifat satu kesatuan yang menjadi penyelenggara pemilu dan selalu bersama mengemban tugas yang ditetapkan. Kedua lembaga tersebut memiliki fungsi sebagai lembaga penyelenggara pemilu untuk menentukan pilihan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kepala daerah (Gubernur), Walikota atau Bupati, Serta Presiden dan wakil presiden yang secara langsung dipilih oleh rakyat.

Dalam perjalanan karirnya, bawaslu memiliki catatan yang cukup banyak dalam menempuh jalur menuju lembaga atau badan yang permanen. Organisasi bawaslu terlahir melalui proses yang sangat panjang. Dikutip dari buku *Mengenal Penegak Demokrasi (Dibalik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP)* yang disusun oleh Sekjen Bawaslu RI, dalam sejarahnya organisasi pengawas pemilu pertama atau baru dikenal pada pemilu tahun 1982, meskipun pemilu pertama di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 1955.⁸⁸ Dikutip dari buku *Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia* yang disusun oleh KPU, di pemilu tahun 1982 pengawasan dilaksanakan oleh suatu organisasi atau lembaga resmi yang telah dibentuk atas dasar UU Nomor 2 Tahun 1980. Pada waktu itu, pengawasan pemilu dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Pusat (Panwaslakpus), Panitia Pengawas Pemilu Tingkat I (Panwaslak I), Pengawas Pemilu Tingkat II

⁸⁸ Suswantoro, Gunawan. *Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP*. Erlangga : 2018.

(Panwaslak II), serta Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan (Panwaslakkam).



Gambar 3.3 Simbol pengawas pemilu tahun 1982
Sumber : Dok. Bawaslu

Gambar diatas merupakan simbol pengawas pemilu dimana baru muncul dan dikenal pada tahun 1982 yang dilakukan oleh susunan kepanitiaan dengan nama Panwaslak. Pada saat itu keanggotaan dari panwaslak terdapat unsur Pemerintah, ABRI, dan Peserta Pemilu dalam Organisasi Pengawas Pemilu.

Sekalipun pada pergelaran atau pelaksanaan pemilu tahun 1977, awalnya muncul ketidakpuasan atas penyelenggaraannya, fungsi pengawasan dengan organisasi resmi yang secara khusus ditujukan untuk mengawasi pemilu tidak berjalan sepenuhnya dengan optimal. Fungsi pengawasan pemilu tetap menjadi kurang jelas karena struktur organisasinya menjadikan lembaga pengawas ini sekedar subordinat dari kepanitiaan penyelenggara pemilu yang bernama panwaslak pemilu.⁸⁹

Pada pasca reformasi 1998 tepatnya pada tahun 1999, kedudukan lembaga pengawas Pemilu semakin menguat ketika diselenggarakannya pemilihan umum. Pada waktu itu lembaga pengawas Pemilu menjadi organisasi mandiri, yang

⁸⁹ Ibid

keanggotaannya meliputi unsur nonpartisan seperti akademisi, tokoh masyarakat, dan organisasi pemerintah. Selanjutnya pada pemilu tahun 2004, Panitia Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat menjadi PPP menjadi bagian penyelenggaraan Pemilu yang proses pembentukannya di tingkat pusat dilakukan oleh KPU. PPP juga bertanggungjawab kepada KPU. Akan tetapi, hubungan PPP ditingkat pusat dengan PPP di daerah sampai tingkat kecamatan tetap bersifat hierarkis.

Dengan pertimbangan pemilu tahun 1999 dan 2004 yang dimana kepengawasan pemilu masih lemah dikarenakan pengawas pemilu dibentuk oleh KPU. Maka pasca pemilu 2004 diciptakan pengawas pemilu yang lebih kuat ketimbang sekedar pengawas pemilu seperti yang berlaku di tahun 1999 dan 2004. Embrio pembentukan Bawaslu sebagai lembaga yang permanen dimulai secara konkret pasca Pemilu 2004. Pembentukan itu dikawal oleh tim kecil dari Komisi II DPR yang menyiapkan materi awal Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Pemilihan Umum pada September 2005.

RUU tentang Penyelenggara Pemilu selanjutnya mulai disusun ketika dilakukam rapat Paripurna DPR pada 14 November 2005. Rapat ini menyetujui RUU hasil usulam Komisi II DPR, dan menyepakati agar dijadikan RUU inisiatif DPR. Melalui forum Badan Musyawarah (Banmus), dan Panitia Khusus (Pansus) RUU pun dibentuk dan tugas awalnya adalah menyempurnakan draf RUU. Kemudian draf RUU diserahkan kepada Presiden pada juli 2006 yang selanjutnya menghasilkan keluaran berupa penerbitan Surat Presiden Nomor R.70/pres/9/2006

yang menunjuk Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) mewakili Presiden dalam pembahasan bersama DPR.⁹⁰

Banyak problematika selama pembahasan RUU tersebut, salah satu alasan yang kerap muncul untuk mempermanenkan lembaga pengawas pemilu ialah kekhawatiran mengenai posisi KPU yang berpotensi menjadi lembaga superbody, karena kewenangannya tak tersentuh oleh lembaga lain. Sekalipun telah diawasi secara internal, ada pemikiran juga KPU diawasi oleh lembaga eksternal, terutama dalam melaksanakan pemilu. Ide lainnya yaitu untuk tidak menjadikan lembaga pengawas menjadi duplikasi atau bayangan KPU serta tidak menjadi lembaga subordinasi KPU. Dalam naskah akademis, RUU usulan DPR tentang Penyelenggaraan Pemilu, dinyatakan:

“Permasalahannya adalah lemahnya panitia pengawas dengan mengingat bahwa panitia pengawas dibentuk oleh KPU sehingga ia bertanggung jawab kepada KPU atau subordinat kepada KPU. Namun, karena panitia pengawas harus mengawasi penyelenggaraan Pemilu yang salah satunya adalah mengawasi pelaksana pemilu (KPU), maka muncul situasi tidak kondusif. Bagaimana mungkin panitia pengawas mengawasi KPU yang merupakan “atasannya. Oleh karena itu perlu dipikirkan agar masa di mendatang pengawas dapat bergerak leluasa tetapi tidak menjadi lembaga yang akan menghambat penyelenggaraan pemilu”.⁹¹

Selanjutnya RUU tentang pemilu yang dibahas sejak November 2005 pun kemudian diputuskan ditingkat pertama pada 12 maret 2007 dalam forum rapat kerja Pansus yang dilakukan DPR bersama wakil pemerintah. Hasil putusannya selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna DPR pada 20 Maret 2007. Rapat

⁹⁰ Suswantoro, Gunawan. Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP. Erlangga : 2018.

⁹¹Ibid.

paripurna tersebut telah mengukir sejarah yang mengesahkan UU No.22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu.⁹²

UU tersebut mengamanatkan bahwa pembentukan Bawaslu di tingkat Pusat yang bersifat permanen. Sementara dibawah Bawaslu, dibentuk Panwaslu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, serta Pengawas Pemilu lapangan (PPL) dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN), yang bersifat *ad hoc*.

Selanjutnya muncul kembali problematika kondisi politik yang ada di pasca pemilu tahun 2009. Tidak jauh berbeda dengan pasca pemilu 2004, dimana kekecewaan anggota DPR atas kualitas pemilu tahun 2009 mendorong upaya untuk merevisi UU Penyelenggaraan Pemilu Sebelumnya. Sulit dibantah bahwa dilakukannya revisi UU Nomor 22 tahun 2007 didasari antara lain, pertimbangan untuk secepatnya mengganti penyelenggara pemilu yang kemudian dilakukan pemangkasan masa jabatan KPU dan Bawaslu menjadi 4 (empat) tahun saja. Hal ini setidaknya juga dipicu oleh hasil kerja panitia Hak Angket DPR tentang pelanggaran Hak Konstituonal Warga Negara untuk memilih yang pada akhir September 2009 merekomendasikan pemberentian anggota KPU. Pada yang bersamaan bawaslu juga uji materi kepada MK terhadap sejumlah pasal dalam UU No. 22 Tahun 2007 yang menyangkut kewenangan KPU terkait dengan pengawasan Pemilu.⁹³

Pada tahap berikutnya, dalam laporan Rapat Paripurna DPR pada 20 September 2011, Komisi II DPR yang ditugaskan dalam membahas RUU terkait pemilu menegaskan bahwa Bawaslu merupakan unsur penyelenggara pemilu yang

⁹² Suswantoro, Gunawan. Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP. Erlangga : 2018.

⁹³ Suswantoro, Gunawan. Mengawal Penegak Demokrasi Di Balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP. Erlangga : 2018.

keberadaannya sejajar dengan KPU, sebagaimana yang ditegaskan oleh MK dalam keputusannya waktu itu, Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010. Sidang paripurna tersebut selanjutnya menetapkan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu, yang kemudian disahkan oleh Presiden pada 16 Oktober 2011. Dengan berlakunya UU tersebut, kewenangan Bawaslu bertambah besar.

UU Nomor 15 Tahun 2011 juga mengamanatkan Bawaslu Menjadi lembaga pengawas Pemilu permanen sampai ditingkat Provinsi dengan nomenkatur Bawaslu Provinsi. Sementara Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, dan PPLN tetap bersifat *ad hoc*, yang paling lambat sebulan sebelum pelaksanaan dibentuk dan berakhir dua bulan paling lambat setelah seluruh tahapan pemilu selesai.

(Sumber: Diolah dari Buku Mengawal Penegak Demokrasi: Di balik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP)

4.2 Pembentukan Bawaslu Kota Malang

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa hingga tahun 2011 lembaga bawaslu telah ditetapkan menjadi lembaga permanen yang semakin besar wewenangnya terhadap penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi penjelasan diatas menyebutkan bahwa hanya sampai tingkat provinsi lembaga ini yang bersifat permanen, yang lain tetap bersifat *ad hoc*. Hal ini sebagaimana dikemukakan menurut data wawancara yang didapat pada Kepala divisi Organisasi, SDM, dan Data Bawaslu Kota Malang bahwa lembaga ad hoc merupakan

“lembaga yang tidak tetap dan proses pembentukannya sebelum pelaksanaan dimulai dan selambat-lambatnya satu bulan sebelum penyelenggaraan dalam pemilu.”⁹⁴

⁹⁴ Data Wawancara dengan Ibu Erna Maghfiroh selaku kepala divisi Organisasi, SDM, dan Data

Memang banyak kelemahan yang dimiliki lembaga adhoc yang salah satunya adalah memiliki masa bakti dalam masa pelaksanaan serta wewenangnya pun dirasa cukup singkat karena ada masa atau periodenya.

Fokus penelitian ini adalah kepada Bawaslu Kota Malang yang tentunya lembaga ini berada di wilayah daerah, tidak berada di pusat ataupun provinsi. Pada saat itu bawaslu Kota Malang masih menjadi lembaga *ad hoc* dan namanya pun masih bernama Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Malang yang dibentuk dengan dasar UU No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilu. Dalam pemilu peran lembaga pengawas yaitu Bawaslu merupakan unsur yang sangat penting yang diperlukan dalam pelaksanaannya, jika dilihat dalam sejarahnya memang bawaslu mengemban tugas yang berat selama dari tahun ke tahun pemilu untuk mewujudkan pemilu yang demokratis dan berkualitas.

Hingga tahun ke tahun penyelenggaraan pemilu yaitu 2014 (Pemilihan Legislatif) dan 2015, lembaga pengawas atau bawaslu Kota Malang masih menjadi lembaga *ad hoc*. Meskipun masih menjadi lembaga *ad hoc*, penyelenggaraan pemilu masih bisa terlaksana dengan baik, meskipun banyak ditemui kendala dalam pelaksanaan serta masih menyandang lembaga *ad hoc*, hubungan antar pengawas masih berjalan dengan lancar dan bersifat herarkis.

Hingga puncaknya pada tahun 2018 terselenggaranya Pemilihan Umum Kepala daerah yang selanjutnya disingkat Pilkada, Panwaslu Kota Malang masih menjadi lembaga *ad hoc*, meskipun telah terbit UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang di dalamnya tercantum nama Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan tidak lagi menyandang nama Pengawas Pemilu, akan tetapi dengan mempertimbangkan kekurangan-kekurangan pemilu sebelumnya dimana

lembaga ad hoc tidak mempunyai wewenang penuh dalam daerahnya maka terlahirlah Bawaslu Kota Malang pasca Pilkada tahun 2018. Hal ini juga diperkuat dengan Narasumber yang penulis ketemui di kantor Bawaslu Kota Malang yang bernama Ibu Erna Al Maghfiroh selaku jajaran anggota pimpnan dan penanggung jawab divisi Organisasi, SDM, dan Data.

Ibu Erna :

“Memang kami anggota dari Bawaslu Kota Malang sebelum terlaksananya pilkada tahun 2018 masih menjadi lembaga ad hoc, artinya susunan organisasinya terbentuk pada saat sebelum pemilu dilaksanakan. Banyak kendala yang kami hadapi karena masih menyandang lembaga ad hoc dan wewenang kami hanya sebatas masa bakti yang telah ditentukan. Meskipun demikian, kami tetap menjalankan kinerja kami semaksimal mungkin dengan dana yang terbatas dan SDM yang kurang mumpuni”.

Lahirnya Bawaslu Kota Malang memiliki harapan yang banyak bagi masyarakat serta unsur-unsur terkait baik mendukung atau berpartisipasi dalam Pemilu yang ada di daerah. Dengan lahirnya Bawaslu Kota Malang yang menjadi lembaga pengawas permanen maka semakin besar wewenang, fungsi, dan tugas dari lembaga ini unuk mengemban kepercayaan yang telah diberikan untuk mengawal pelaksanaan pemilu di Kota Malang.

Meskipun telah lahir, masalah-masalah yang dihadapi bawaslu setelah ditetapkan menjadi lembaga permanen pada Agustus 2018 bertambah banyak. Akan tetapi menurut jajaran anggota bawaslu, “perjuangan baru saja dimulai”, mereka tetap optimis dalam memperjuangkan hak sebagai lembaga pengawas pemilu yang permanen meskipun banyak diterpa kejadian yang tidak diduga oleh jajaran anggota Bawaslu Kota Malang.

Memang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengamanatkan, pengawas pemilu ditingkat kabupaten/kota menjadi lembaga permanen yaitu Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota/Kabupaten. Akan tetapi pada waktu itu sebelum pengesahan sekaligus untuk memenuhi perintah UU tersebut, Bawaslu RI menyiapkan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sebagai dasar hukumnya. Bawaslu menargetkan, transisi dapat dimulai paling lambat April 2018.

Tabel 4.1 Sejarah Bawaslu

Tahun	Status Lembaga	Dasar Hukum	Keanggotaan
1982	Ad hoc	UU No. 2 Tahun 1980	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia Pengawas Pemilu Pusat (Panwaslakpus) 2. Panitia Pengawas Pemilu Tingkat I (Panwaslak I) 3. Panitia Pengawas Pemilu Tingkat II (Panwaslak II) 4. Panitia Pengawas Pemilu Tingkat III (Panwaslak III) 5. Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kecamatan (Panwaslakcam)
1999	Ad hoc (Organisasi Mandiri)	UU No. 2 Tahun 1980	<ol style="list-style-type: none"> 1. Norpartisan (Akademisi) 2. Tokoh Masyarakat 3. Oranisasi Pemerintah
2004	Ad Hoc	UU No. 2 Tahun 1980	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panitia Pengawas Pemilu pusat (PPP) bentukan KPU 2. PPP Provinsi 3. PPP Daerah 4. PPP Kecamatan
	Embrio Pembentukan Bawaslu (Pasca Pemilu 2004)	RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum (September 2005)	
2007	Permanen (Hanya Bawaslu Pusat)	UU No. 22 Tahun 2007	<ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Pusat) 2. Panwaslu Provinsi 3. Panwaslu Kab/Kota 4. Panwaslu Kecamatan 5. Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) 6. Pengawas Pemilu Luar Negeri

			(PPLN)
2011	Permanen (Hanya Bawaslu RI dan Provinsi)	UU No. 15 Tahun 2011	1. Bawaslu RI 2. Bawaslu Provinsi 3. Panwaslu Kab/Kota 4. Panwascam 5. PPL 6. PPLN
2018	Permanen (Bawaslu RI, Provinsi) dan Bawaslu Kab/Kota bersifat permanen pasca Pilkada 2018	UU No. 7 Tahun 2017	1. Bawaslu RI 2. Bawaslu Provinsi 3. Bawaslu Kab/Kota 4. Panwascam 5. Pengawas TPS 6. PPLN

Sumber: Diolah dari buku Mengawal Penegak Demokrasi : Dibalik Tata Kelola Bawaslu dan DKPP

Bawaslu kota Malang memiliki visi dan misi yang sama seperti Bawaslu RI, karena bawaslu kota Malang hanya anak cabang dari bawaslu provinsi. Maka untuk keseluruhan dari Bawaslu RI hingga kepanitiaan pengawas pemilu kecamatan sama seperti Bawaslu RI, artinya visi misi yang tercantum memang global. Visi misi dari Bawaslu diantara lain adalah sebagai berikut;

3.2.1 Visi dan Misi Bawaslu

VISI

Terwujudnya serta terbentuknya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal yang Terpercaya dalam Penyelenggaraan Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas⁹⁵

MISI

1. *Membangun aparatur serta kelembagaan pengawas pemilu yang kuat, mandiri dan solid.*
2. *Mengembangkan pola serta metode pengawasan yang efektif dan efisien.*
3. *Memperkuat sistem nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan berbasis teknologi.*
4. *Meningkatkan keterlibatan masyarakat serta peserta pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.*

⁹⁵ Bawaslu.go.id diakses melalui google pada 5 Agustus 2019

5. *Meningkatkan kepercayaan atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan serta penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.*
6. *Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun pihak dari luar negeri.*⁹⁶

3.2.2 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu

Adapun Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

Tugas Bawaslu:

Dalam pelaksanaannya bawaslu memiliki peran penting dan tugas yang harus diemban sebagai pengawas pemilu, tugas dari bawaslu yaitu sebagai berikut ini:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan, dari tingkatan pusat hingga terbawah
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - a. Pelanggaran terhadap Pemilu.
 - b. Sengketa proses terhadap Pemilu.
- c. Mengawasi persiapan seluruh penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri dari:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilihan umum.
 2. Perencanaan pengadaan periodik oleh Komisi Pemilihan Umum.
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan atau UU.

⁹⁶ Ibid

d. Mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang terdiri dari:

1. Pemutakhiran Data Pemilih (DP) dan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) serta Daftar Pemilih Tetap (DPT).
2. Penataan serta penetapan daerah pemilihan DPRD kab/kota.
3. Penetapan Peserta Pemilihan Umum.
4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan ketentuan peraturan atau UU.
5. Pelaksanaan serta dana kampanye.
6. Pengadaan Pemilu serta pendistribusiannya.
7. Pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) sampai ke Petugas Pemungut Kecamatan (PPK).
9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Petugas Pemungut Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab/Kota, KPU Provinsi, dan KPU Pusat.
10. Pelaksanaan penghitungan serta pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, ataupun Pemilu susulan.
11. Penetapan hasil Pemilihan Umum.

e. Mencegah terjadinya macam-macam praktik politik uang.

- f. Mengawasi netralitas aparatur sipil, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Serta netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
- g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas;
1. Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran serta sengketa Pemilu.
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, serta Bawaslu Kabupaten/Kota.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), serta netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
- h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
- i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilihan Umum kepada Gakkumdu.
- j. Mengelola, memelihara, serta merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan dan UU yang berlaku.
- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilihan Umum.
- l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum(KPU).
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wewenang Bawaslu:

- a. Menerima serta menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau UU yang mengarah mengenai Pemilihan Umum.

- b. Memeriksa, mengkaji, serta memutus pelanggaran, administrasi Pemilihan Umum.
- c. Memeriksa, mengkaji, serta memutus pelanggaran politik uang.
- d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, serta memutus penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum.
- e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara (ASN), netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
- f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan serta penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilihan Umum, serta sengketa proses Pemilihan Umum.
- h. Mengoreksi putusan serta rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan atau UU yang berlaku.
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/ Kota, dan Panwaslu Luar Negeri (LN)
- j. Mengangkat, membina, serta memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kab/Kota, dan anggota Panwaslu Luar Negeri (LN).

- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Bawaslu:

- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang, hal ini berarti bawaslu disaat menjalankan tugas memiliki kewajiban sikap yang adil terhadap pencegahan ataupun penindakan disaat melaksanakan wewenangnya.
- b. Melakukan pembinaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan, hal ini berarti tidak ada pengecualian bagi seluruh pihak pengawas pemilu disetiap tingkatannya harus ikut dalam pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas.
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan, artinya seluruh hasil kegiatan akan dilaporkan kepada Presiden dan Dpr sesuai dengan prosedur dari Bawaslu
- d. Mengawasi pemutakhiran serta pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan, artinya selama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku terkait pengawasan dalam pemilu maka Bawaslu wajib melakukannya

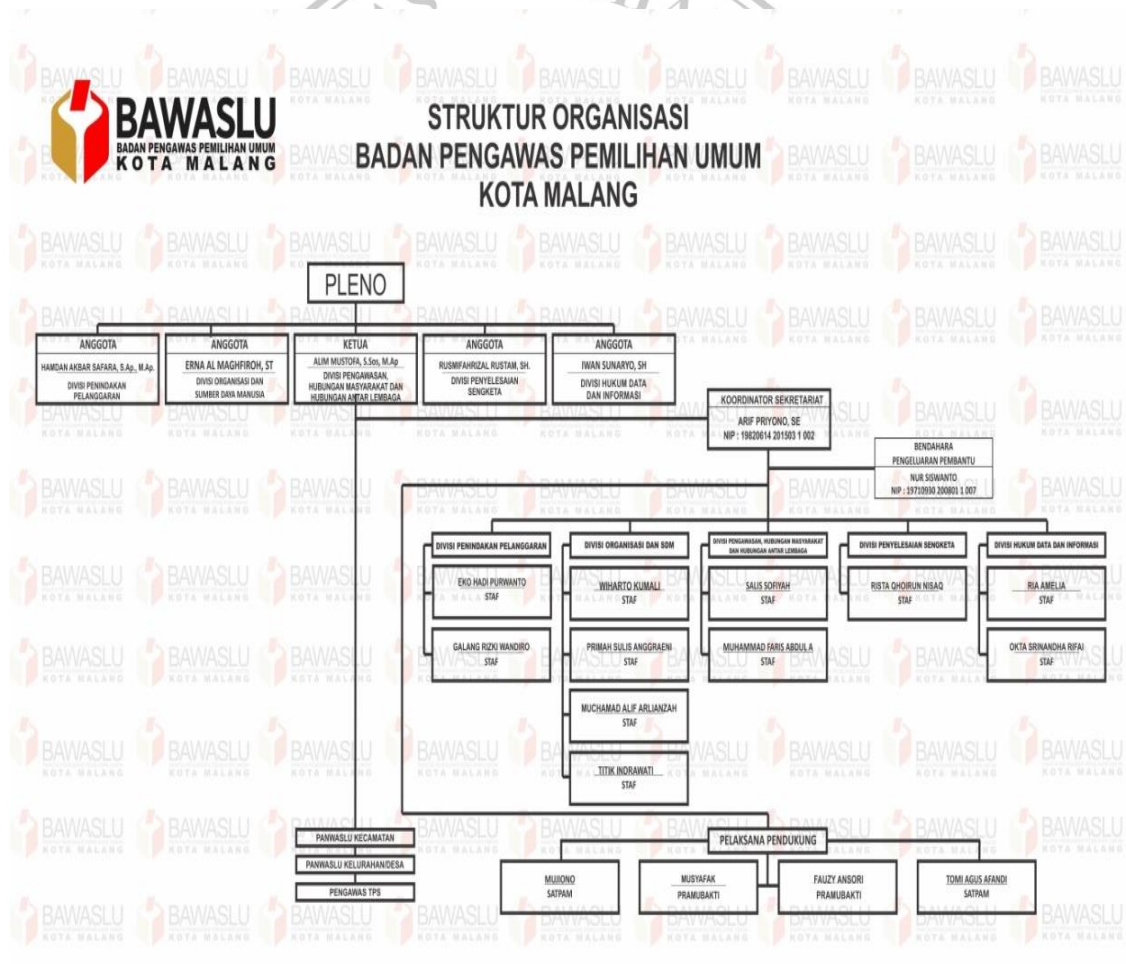
(Sumber : bawaslu.go.id)⁹⁷

⁹⁷ www.bawaslu.go.id

Profil Bawaslu Kota Malang

Penelitian ini di fokuskan kepada lembaga yang menangani pengawasan penyelenggaraan pemilu di kota malang yaitu Badan Pengawas Pemilu kota Malang yang bertugas melakukan seluruh tahapan pengawasan pemilu dari awal hingga akhir sesuai dengan dasar hukum Undang-Undang No 7 tahun 2017. Bawaslu kota Malang yang menjadi fokus penelitian akan dikaji apakah tugasnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan berjalan dengan efektif atau tidak. Berikut ini profil dari bawaslu Kota Malang;

3.2.3 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Malang



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Malang
Sumber : Malangkota.bawaslu.go.id

Jajaran Kepengurusan Badan pengawas Pemilu Kota Malang

Dalam struktur organisasi diatas disebutkan ada beberapa bagian dari mulai pimpinan Badan hingga pendukung. Dalam jajaran pimpinan terdapat lima orang yang terdiri dari ketua dan anggota yang sekaligus menjadi pimpinan divisi. Berikut penjabaran dari struktur organisasi bawaslu Kota Malang;

1. **Alim Mustofa, S.Sos, M.Ap** sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu sekaligus menjadi penanggungjawab divisi Pengawasan, Hubungan masyarakat, dan Hubungan Antar Lembaga yang terkait dengan pemilu di Kota Malang.
2. **Hamdan Akbar Safara, S.Ag, M.Ap** sebagai anggota Bawaslu sekaligus menjadi penanggungjawab divisi penindakan dan pelanggaran terkait dengan pelaksanaan pemilu di Kota Malang.
3. **Erna Al Maghfiroh, ST** sebagai anggota Bawaslu sekaligus penanggungjawab dari divisi organisasi dan sumber daya manusia terkait dengan lembaga.
4. **Rusmifahrizal Rustam, SH** sebagai anggota Bawaslu sekaligus penanggungjawab divisi penyelesaian sengketa terkait dengan pemilu di Kota Malang.
5. **Iwan Sunaryo, SH** sebagai anggota Bawaslu sekaligus penanggungjawab dari divisi hukum data dan informasi yang berkaitan dengan proses pemilu di Kota Malang.

Kelima nama diatas merupakan jajaran pimpinan organisasi atau Badan Pengawas Pemilu Kota Malang. Selain nama diatas juga terdapat banyak orang

yang turut melaksanakan teknis kinerja dari Bawaslu. Berikut nama-nama anggota bawaslu lainnya serta staf pendukung;

6. **Arif Priyono, SE** sebagai koordinator sekretariat yang bertugas mendukung dan penanggung jawab sekretariat dari Bawaslu Kota Malang.
7. **Nur Siswanto** sebagai bendahara pengeluaran pembantu yang bertugas untuk mengelola keuangan atau anggaran yang diterima Bawaslu Kota Malang.
8. **Eko Hadi Purwanto dan Galang Rizki Wandiro** sebagai staf divisi penindakan dan pelanggaran yang bertugas untuk mendukung dan membantu pekerjaan kepala atau penanggungjawab divisi.
9. **Wiharto Kumali, Primah Sulis Anggraeni, Muchamad Alif Arlianzah, dan Titik Indrawati** sebagai staf dari divisi organisasi dan SDM yang bertugas menjadi pelaksana teknis atau pendukung dari divisi.
10. **Salis Sofiyah dan Muhammad Faris Abdul. A** seagai staf pelaksana teknis dan pendukung dari divisi pengawasam, hubungan masyarakat, serta hubungan antar lembaga.
11. **Rista Qhoirun Nisaaq** sebagai staf pelaksana dan pendukung dari divisi penyelesaian sengketa terkait pemilu.
12. **Ria Amelia dan Okta Srinandha Rifai** sebagai staf pelaksana dan pendukung dari divisi hukum data dan informasi.
13. **Mujiono, Tomy Agus Afandi, Musyifak, dan Fauzy Ansori** sebagai pelaksana pendukung yaitu satpam dan pramubakti.



Gambar 3.4 Foto Kantor Bawaslu
Sumber : *Malangkota.Bawaslu.go.id*

Gambar diatas merupakan foto kantor Bawaslu Kota Malang yang berada di daerah dekat dengan Terminal Arjosari yang tepatnya di kecamatan Blimbing. Kantor ini cukup luas dan bisa menampung kendaraan dinas dan beberapa ruangan kerja. Kantor ini cukup mudah untuk diakses melalui google maps akan tetapi kekurangannya kantor ini tidak strategis karena berada di akses jalan kelurahan. Berikut ini keterangan dari Kantor Bawaslu Kota Malang ;

Nama Badan	Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang
Alamat Kantor	Jl. Teluk Cendrawasih No.01, Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126
Nomor telfon	0812-4901-0974
Ketua Badan	Alim Mustofa, S.Sos. M.Ap
Jumlah Anggota	5 Orang (Pimpinan)
Jumlah Divisi	5 Divisi (11 Orang)
Pelaksana Pendukung	4 Orang
Jam operasional pelayanan	Senin jumat 08.00 – 16.00 Sabtu 08.00 – 12.00 Minggu Tutup
Alamat web	Malangkota.bawaslu.go.id